

**PENGUATAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA**

**UNTUK
MENINGKATKAN PELAKSANAAN
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**PENGUATAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA**

**UNTUK
MENINGKATKAN PELAKSANAAN
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
DAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

Dr. dr. R. Hapsara HR, DPH

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

**PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
DI INDONESIA**

Penulis:

R. Hapsara Habib Rachmat

Korektor:

Andayani

Desain sampul:

Pram's

Tata letak isi:

Maarif

Diterbitkan dan dicetak oleh:

Gajah Mada University Press

Anggota IKAPI

Ukuran : 15,5 X 22 cm; xx + 378 hlm

Font : Times New Roman

ISBN : 978-602-386-040-1

1512308-B5E

Redaksi:

Jl. Grafika No. 1, Bulaksumur

Yogyakarta, 55281

Telp./Fax.: (0274) 561037

gmupress@ugm.ac.id | gmup.ugm.ac.id

Cetakan pertama: Februari 2016

2127.05.01.16

Hak Penerbitan @ 2016 Gajah Mada University Press

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, photoprint, microfilm, dan sebagainya.

PERSEMBAHAN

Buku ini dipersembahkan kepada tenaga-tenaga yang bertugas di bidang kesehatan dan di bidang atau sektor lain yang terkait yang mengabdikan dirinya atau mendukung penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.

Disadari penguatan upaya kesehatan masyarakat sudah diupayakan cukup lama, tetapi kemajuannya sampai dewasa ini masih terbatas. Oleh karena itu, perlu diupayakan dengan lebih saksama penguatan upaya kesehatan masyarakat tersebut oleh tenaga-tenaga yang kompeten dalam bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait. Penguatan ini perlu melandaskan pada Paradigma Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan.

Dewasa ini dipandang penting adanya percepatan penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sehingga bersama dengan penguatan upaya kesehatan perorangan, terutama melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional, diharapkan dapat meningkatkan akselerasi, pemerataan, dan mutu pembangunan kesehatan di Indonesia.

Buku ini juga dipersembahkan kepada istriku, Sunartini; anak-anakku: Cokie, Naning, Arya, Thithut, Dodo, Astri, Titok, Pipit; dan cucu-cucu: Shadrina, Rachma, Bagas, Mawla, Kenar, serta Fiqa. Tanpa kasih sayang, bantuan, dorongan, dan pengorbanan kalian, buku ini tidak mungkin terwujud.

PRAKATA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan jangka panjang terutama sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, pembangunan kesehatan telah mencapai banyak kemajuan. Meskipun demikian, ada tantangan yang perlu disikapi, antara lain dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif serta meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pada hakikatnya: 1) Paradigma sehat secara mendasar adalah cara pandang yang fundamental bahwa pembangunan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga dalam pembangunan, serta 2) Paradigma sehat secara operasional adalah dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional, serta Sembilan Agenda Pembangunan (Nawacita) yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2014, telah diarahkan oleh pemerintah bahwa Program Indonesia Sehat pada pokoknya meliputi: 1) Paradigma sehat, 2) Penguatan pelayanan kesehatan, dan 3) Jaminan Kesehatan Nasional.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, maka pada 1 Januari 2014 Jaminan Kesehatan Nasional mulai dilaksanakan. Kedua undang-undang ini memperkuat upaya meningkatkan akselerasi, pemerataan, dan mutu pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dalam kaitan ini upaya kesehatan perorangan diperhitungkan semakin kuat seperti yang diharapkan.

Dengan mengacu pada pentingnya percepatan pembangunan kesehatan secara keseluruhan, jelas diperlukan adanya penguatan upaya kesehatan

masyarakat yang dikembangkan secara bersamaan dengan penguatan upaya kesehatan perorangan sehingga secara keseluruhan upaya meningkatkan akselerasi, pemerataan, dan mutu pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional ditetapkan bahwa pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan merupakan fokus dari pembangunan kesehatan. Fokus ini merupakan salah satu pertimbangan penting mengapa buku ini diterbitkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan tersebut perlu disertai dengan penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan pendekatan proses penguatan yang lebih terarah, menyeluruh, dan saling terkait, serta realistis dan didukung dengan sumber daya yang memadai. Proses ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019.

Maksud dari buku ini adalah untuk mengemukakan penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menguatkan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit di masyarakat serta pemberdayaan masyarakat agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dengan adanya program JKN dapat diartikan bahwa strategi penguatan upaya kesehatan perorangan telah lebih siap, tetapi berbagai taktik pelaksanaannya perlu terus disempurnakan atau diperbaiki. Di lain pihak penguatan upaya kesehatan masyarakat pada dasarnya sudah ada berbagai taktik pelaksanaannya, tetapi strategi penguatan upaya kesehatan masyarakatnya yang bersifat menyeluruh masih perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Diharapkan pandangan dan saran-saran dari buku ini dapat memberi masukan untuk peningkatan pelaksanaan dan pengembangan pembangunan kesehatan yang ditetapkan sehingga upaya kesehatan masyarakat dapat lebih diketengahkan sebagaimana mestinya di samping perlu adanya upaya kesehatan perorangan yang berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Buku ini disusun dalam tujuh bab dan disertai delapan bahan pendukung. Dalam Bab 1 Pendahuluan mengemukakan latar belakang, maksud, dan pendekatan penyusunan bahan ini. Bab 2 Perkembangan dan Tantangan Pembangunan Kesehatan serta Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan a) Pembangunan kesehatan, b) Penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bab

3 Kebijakan Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan a) Dasar penguatan upaya kesehatan masyarakat, b) Tujuan dan sasaran, serta c) Strategi. Bab 4 Cara Penyelenggaraan Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat mengemukakan a) Analisis, *monitoring*, dan penilaian, b) Pengembangan kebijakan, c) Pelaksanaan dan dukungan. Bab 5 Cara Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan a) Penggerakan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif preventif, b) Pengorganisasian dalam pemberdayaan masyarakat, yang mendorong antara lain terbentuknya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), c) Melakukan advokasi, promosi, dan penyebarluasan informasi kesehatan, d) Kemitraan dengan berbagai sektor terkait, lembaga legislatif, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi, serta e) Peningkatan sumber daya, termasuk adanya fasilitator, komunikator, dan dinamisator dalam proses pemberdayaan masyarakat. Bab 6 Dukungan Penyelenggaraan mengemukakan a) Proses penyelenggaraan, b) Tata penyelenggaraan, c) Penyelenggara, d) Pembiayaan kesehatan, e) Sistem informasi kesehatan, f) Pelaksanaan Paradigma Sehat, g) Pembinaan dan pengawasan, serta h) Kerja sama internasional. Bab 7 Pengembangan Penyelenggaraan, a) Pada tingkat nasional, dan b) Pada tingkat daerah. Bab 8 Penutup.

Penguatan upaya kesehatan masyarakat yang dikemukakan dalam bahan ini diharapkan bersama dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mendukung percepatan pembangunan kesehatan sehingga dapat meningkatkan akselerasi, pemerataan, dan mutu pembangunan kesehatan.

Masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat dihargai. Alamat *e-mail* saya rhapsarahr@gmail.com. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 2015

R. Hapsara HR

PENGANTAR

PERLU PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Pidato Wakil Presiden M. Jusuf Kalla pada pembukaan Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Post-2015 (*Post-2015 Sustainable Development Goals*) di depan 193 kepala negara sedunia menunjukkan keberhasilan program yang telah dicapai Indonesia dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberantasan kemiskinan. Wakil Presiden menyatakan Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan 17 tujuan dan 169 sasaran, baik dalam Nawacita maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 (RPJMN 2015–2019).

Dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang dideklarasikan oleh PBB pada 25 September 2015, terdapat satu tujuan yang menyangkut bidang kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga pada semua usia. Untuk mencapai 9 sasaran tujuan bidang kesehatan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden menyatakan perlunya dilakukan perubahan paradigma Pembangunan Bidang Kesehatan Nasional dari merawat dan menyembuhkan orang sakit dengan mengandalkan pembiayaan dari pemerintah, menjadi bagaimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun lingkungan hidup yang lebih menjamin kehidupan warga yang lebih sehat (*Kompas*, 28 September 2015).

Dalam paradigma pembangunan kesehatan yang esensinya terangkum dalam Tujuan Ketiga Deklarasi 2030 PBB tersebut yang dinamakan Program Indonesia Sehat terdiri atas dua bagian, yaitu *pertama*, Program Penguatan Upaya Kesehatan Perorangan; *kedua*, Program Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat. Pokok-pokok pikiran tentang pendekatan yang kedua tersebut disajikan oleh Dr. Hapsara dalam buku ini yang menguraikan secara sistematis dan mendetail tentang kebijakan termasuk strateginya, cara penyelenggaraan,

dukungan, serta pengembangan penyelenggaraan penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Indonesia. Strategi tersebut dilaksanakan terutama dengan pendekatan proses yang lebih terarah, menyeluruh, dan saling terkait serta realistis dan didukung dengan sumber daya yang memadai.

Pembangunan nasional bidang kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia meliputi baik perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian masyarakat maupun intervensi promotif dan preventif yang dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun oleh masyarakat melalui lembaga pelayanan kesehatan telah berkembang dengan pesat. Bahkan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, lembaga-lembaga pelayanan kesehatan telah menarik para pelaku bisnis kesehatan dari dalam dan bahkan luar negeri yang memerlukan pelayanan kesehatan yang semakin maju melalui penerapan teknologi kedokteran mutakhir.

Komersialisasi pelayanan kesehatan individual oleh lembaga pelayanan kesehatan komersial dari dalam dan luar negeri di satu pihak telah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan individual di Indonesia. Tetapi, di lain pihak telah menyebabkan semakin besarnya kesenjangan akses masyarakat kurang mampu terhadap pelayanan kesehatan modern. Usaha pemerintah untuk mengurangi akses tersebut melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional belum berhasil dalam mempersempit kesenjangan yang ditimbulkan oleh komersialisasi pelayanan kesehatan.

Walaupun sudah cukup banyak kemajuan yang dicapai Indonesia dalam bidang kesehatan perorangan bagi hampir 250 juta rakyat, tetapi dinilai dari beberapa *outcome* utama bidang kesehatan, Indonesia tertinggal cukup jauh dari bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019 menunjukkan pada 2015, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran ialah 346 (BPS, 2010), jauh lebih tinggi dari negara-negara di Asia Tenggara; angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 pada tahun 2012; prevalensi kekurangan gizi pada balita 19,6 persen pada tahun 2013; dan prevalensi *stunting* pada anak bawah dua tahun ialah 32,9 persen pada tahun 2015.

Sementara itu, keadaan beberapa penyakit di masyarakat juga belum menunjukkan perbaikan yang menggembirakan. Prevalensi tuberkulosis masih tinggi, yaitu 297 orang per 100.000 penduduk pada tahun 2013, prevalensi HIV sangat mengkhawatirkan karena sudah mencapai 0,46 persen. Lebih dari

seperempat penduduk Indonesia, yaitu 25,8 persen mengalami tekanan darah tinggi dan seperenam penduduk usia 18 tahun ke atas mengalami obesitas.

Dalam konteks lingkungan sosial masyarakat, seperti dikemukakan dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan, untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat dan agar tercapai peningkatan kesejahteraan untuk semua, diperlukan kebijakan dan program penguatan upaya kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, untuk lebih menjamin tercapainya tujuan nasional bidang kesehatan amat diperlukan kebijakan nasional pemberdayaan masyarakat dalam bidang ini. Kedua kebijakan nasional tersebut—penguatan kesehatan perorangan dan upaya penguatan kesehatan masyarakat—diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional dan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai penahapannya.

Dalam pandangan saya, buku Dr. Hapsara ini merupakan sumbangan pemikiran yang sangat berguna untuk dibaca oleh praktisi manajemen kebijakan kesehatan, dan oleh para mahasiswa kebijakan dan manajemen kesehatan.

Yogyakarta, 3 Oktober 2015



Prof. Dr. Sofian Effendi
Profesor Kebijakan Publik

SAMBUTAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 telah ditetapkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada peri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat tahun 2015–2019 diarahkan untuk mendukung Program Indonesia Sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya telah banyak kemajuan. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu disikapi, antara lain dengan mengutamakan upaya promotif-preventif serta meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Hal ini sejalan dengan RPJPN Tahun 2005–2025 yang menekankan pentingnya peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan. Di samping itu, SKN 2012 juga menetapkan bahwa upaya kesehatan yang meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat, merupakan fokus dari pembangunan kesehatan. Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional

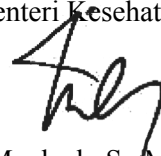
maka upaya kesehatan perorangan dapat semakin diperkuat, walaupun dalam pelaksanaannya masih perlu adanya berbagai perbaikan dan penyempurnaan.

Pentingnya upaya kesehatan masyarakat sebenarnya sudah disepakati sejak lama. Tantangan penguatan upaya kesehatan masyarakat meliputi pemerataan pembangunan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan perorangan, fungsi upaya kesehatan masyarakat, pengelolaan atau manajemen pembangunan kesehatan, dan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Tantangan pemberdayaan masyarakat mencakup penggerakan masyarakat, pengorganisasian masyarakat dalam pemberdayaan, advokasi, kemitraan, dan peningkatan sumber daya.

Saya memandang penting dan strategis mengenai penguatan upaya-upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, di samping program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan sesuai dengan penahapannya. Strategi tersebut perlu dilaksanakan terutama dengan pendekatan proses yang lebih terarah, menyeluruh, dan saling terkait serta realistis dan didukung dengan sumber daya yang memadai. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan yang mengutamakan penguatan upaya kesehatan masyarakat memerlukan perubahan *mindset* atau paradigma dari semua pihak yang terkait.

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Dr. dr. R. Hapsara Habib Rachmat, DPH atas terbitnya buku ini yang menguraikan dengan jelas kebijakan, cara penyelenggaraan, dukungan, dan pengembangan penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memahami dan mendukung penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan ini bersamaan dengan pelaksanaan JKN diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan kesehatan sehingga dapat meningkatkan akselerasi, pemerataan, dan mutu pembangunan kesehatan di Indonesia.

Jakarta, September 2015
Menteri Kesehatan RI



Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K).

SAMBUTAN

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Kesehatan merupakan investasi yang menjadi salah satu faktor penentu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) selain faktor ekonomi dan pendidikan. Semua orang butuh hidup sehat sehingga pemeliharaan kesehatan menjadi penting karena merupakan salah satu pendorong untuk mampu produktif dan meningkatkan kesejahteraan. Kesehatan perlu diupayakan, diperjuangkan, dan ditingkatkan oleh setiap individu, keluarga, dan masyarakat.

Sejalan dengan salah satu misi pemerintahan saat ini yang berupaya mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, agenda pembangunan kesehatan 2015–2019 ke depan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan termasuk gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Untuk tujuan ini dibutuhkan reformasi yang fokus pada: (a) upaya penurunan kematian ibu dan bayi; (b) penguatan upaya promotif dan preventif; (c) penguatan layanan kesehatan dasar; (d) penguatan sistem pengawasan obat dan makanan; dan (e) pematangan sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Program Indonesia Sehat meliputi 3 hal, yaitu Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional. Paradigma Sehat berfokus pada program pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, dengan promotif-preventif sebagai pilar utama. Untuk penguatan pelayanan kesehatan berfokus pada peningkatan akses dan pelayanan yang berkualitas, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu dengan menerapkan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan (*health risk*).

Tantangan pembangunan kesehatan yang masih kita hadapi ke depan, antara lain: angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih cukup tinggi, walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI dan AKB telah mengalami penurunan. Status kesehatan ibu dan anak belum membaik secara signifikan dan kesenjangan masih cukup lebar. Indonesia menghadapi beban

ganda penyakit, yaitu kondisi penyakit menular masih muncul, sedangkan penyakit tidak menular semakin meningkat. Demikian juga permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (*stunting*), terjadi secara luas, tetapi dengan disparitas yang tinggi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penggalangan komitmen seluruh komponen masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan melalui pengembangan upaya-upaya di bidang kesehatan dengan mengutamakan pendekatan promotif-preventif. Hal ini dilakukan karena kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk swasta/dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.

Peran masyarakat dan/atau individu dalam meningkatkan kesehatan dan lingkungannya, semakin hari semakin menuntut keikutsertaan yang tinggi. Berbagai penyakit yang terjadi, baik penyakit menular maupun tidak menular serta munculnya penyakit-penyakit baru, menyebabkan masyarakat harus peduli dan mau bekerja sama dengan semua pihak terkait. Peran serta masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam upaya-upaya kesehatan menjadi sangat penting dan strategis karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan kesehatan bagi mereka.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa perlu dilakukan pengembangan regulasi daerah yang mendukung upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan di daerah yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Kepada penulis yang telah berprakarsa dan berupaya hingga terbitnya buku ini, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai segala langkah dan upaya dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera. Amin.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan RI



dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes.

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
PENGANTAR: PERLU PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	ix
SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	xii
SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
RANGKUMAN	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	9
BAB 2 PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SERTA PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12
A. Pembangunan Kesehatan.....	12
B. Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	28
BAB 3 KEBIJAKAN PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	36
A. Dasar Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat	36
B. Tujuan dan Sasaran	37
C. Strategi	40
BAB 4 CARA PENYELENGGARAAN PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.....	43
A. Analisis, Pengendalian, dan Penilaian.....	43
B. Pengembangan Kebijakan.....	44
C. Pelaksanaan dan Dukungan.....	46

BAB 5	CARA PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	53
BAB 6	DUKUNGAN PENYELENGGARAAN	63
	A. Proses Penyelenggaraan.....	63
	B. Tata Penyelenggaraan.....	81
	C. Penyelenggara	85
	D. Pembiayaan Kesehatan.....	87
	E. Sistem Informasi Kesehatan.....	90
	F. Pelaksanaan Paradigma Sehat.....	93
	G. Pembinaan dan Pengawasan.....	95
	H. Kerja Sama Internasional	96
BAB 7	PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN.....	97
	A. Tingkat Nasional	98
	B. Tingkat Daerah.....	98
BAB 8	PENUTUP.....	99
LAMPIRAN 1.....		101
LAMPIRAN 2.....		102
LAMPIRAN 3.....		105
Bahan 1	Arah Pembangunan Kesehatan yang Berkaitan dengan Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	107
Bahan 2	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sesuai Dengan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	177
Bahan 3	Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	185
Bahan 4	Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Indonesia oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat, dan oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.....	211
Bahan 5	Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang	

	Kesehatan Khususnya Mengenai Penguatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Melalui Pengembangan Inovasi Lokal: Pembelajaran Provinsi Sulawesi Tenggara.....	259
Bahan 6	Kementerian Kesehatan, Usulan Formulasi Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Sebagai Muatan PP tentang Pemberdayaan Masyarakat, 2014.....	285
Bahan 7	Pancasila dan Pengaruhnya pada Filsafat atau Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan.....	291
Bahan 8	Perkembangan, Hambatan, dan Prospek Pelaksanaan Pendekatan Proses dalam Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Berbagai Negara, di Indonesia, dan Organisasi Kesehatan Sedunia	323
	BEBERAPA PENGERTIAN	346
	KEPUSTAKAAN	354
	UCAPAN TERIMA KASIH	370
	BIODATA.....	375